

Psikologi dan Integrasi Bangsa



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Psikologi dan Integrasi Bangsa

(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Editor:

- A Supratiknya
- Tjipto Susana
- Juneman Abraham
- Rahkman Ardi

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Psikologi dan Integrasi Bangsa / [Abd A'la ... [et al.]] ; editor, A Supratiknya ... [et al.].

– Jakarta : Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2020.

hlm.: xvi + 456; 17x25 cm. – (Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

ISBN 978-602-96634-9-5

1. Psikologi... I. A. Supratiknya. II. Seri.

Perwajahan sampul dan tata letak: Bivita Brata Prabawa Riko

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis atau Penerbit.

Cetakan Pertama, Februari 2020.

Penerbit:



Himpunan Psikologi Indonesia

Jl. Kebayoran Baru No. 858

Kebayoran Lama, Velbak

Jakarta 12240 Indonesia

Telp./Fax. 021-72801625

Website: himp.si.or.id

Email: sekretariatpp_himp.si@yahoo.co.id, sekretariat.pp@himp.si.or.id

Psikologi dan Integrasi Bangsa

(Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa 4)

Sambutan Ketua Umum HIMPSI	iii
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xiii

Bagian 1 - Integrasi Bangsa**Bab 1: Integrasi Bangsa dalam Perspektif Islam: Konsep Integrasi dan Kebangsaan dari Islam di Timur Tengah hingga Indonesia**

Abd A'la	3
----------------	---

Bab 2: Independensi Berita dan Integrasi Bangsa

Inge Hutagalung	19
-----------------------	----

Bab 3: Belajar Hidup dari Masyarakat di Wilayah *Ring of Fire*: Telaah Media Edukasi, Komunikasi, dan Budaya

Rahmatsyam Lakoro & Ike Herdiana	39
--	----

Bab 4: Ruang Kelas dan Integrasi Bangsa

Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo	59
---------------------------------------	----

Bab 5: "Meng-iklan-kan" Integrasi Bangsa

Meike Kurniawati	77
------------------------	----

Bab 6: Membangun Mimpi Bersama ke Arah Integrasi Bangsa

Amy Mardhatillah & Ahmad Naufalul Umam	89
--	----

Bab 7: Pendidikan Karakter Sebagai Pilar untuk Membangun Moral Bangsa

Fitria Eka Annisa & Indah Andika Octavia	103
--	-----

Bab 8: Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan di PAUD dan Integrasi Bangsa

Desni Yuniarni	117
----------------------	-----

Bab 9: Penguatan Pendidikan Karakter dan Nilai Utama Bangsa Indonesia Clara R. P. Ajisuksmo & Lucia R. M. Royanto	131
---	-----

Bagian 2 - Keberagaman

Bab 10: Mengelola Keberagaman, Melejitkan Kejayaan Berbangsa Sumaryono	149
--	-----

Bab 11: Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif <i>the Psychology of Diversity</i> Ira Puspitawati, Yosefina Marijke Watofa, & Wahyu Rahardjo	157
---	-----

Bab 12: Memancing Kesadaran akan Keberagaman M. Arief Sumantri	169
--	-----

Bab 13: Refleksi Keragaman Spiritual-Indigenus dalam Ranah Akademis Nisa Rachmah Nur Anganthi	193
---	-----

Bagian 3 - Pemilu dan Korupsi

Bab 14: “Cebong dan Kampret”: Symbolisme Politik dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 di Indonesia Jony Eko Yulianto & Jessie Janny Thenarianto	209
---	-----

Bab 15: <i>American Football</i> dan <i>MRI Scanner</i>: Belajar tentang Fanatisme Politik Harijanto Tjahjono	235
---	-----

Bab 16: Korupsi dan Disintegrasi Bangsa Imadduddin & Yulia Hairina	243
--	-----

Bab 17: Polarisasi Politik dalam Pemilu Adi Heryadi	267
---	-----

Bab 18: “Rasa Takut Bukan Bawaan Dari Lahir”: Sebuah Revolusi Mental Bayu Jatmiko	275
---	-----

Bagian 4 - Identitas Kebangsaan

Bab 19: Menjadi “Kita” sebagai Bangsa: Peran Kerendahan Hati Intelektual dalam Kognisi Sosial Shahnaz Safitri	301
Bab 20: Saya Tionghoa dan Saya Indonesia: Identitas Sosial dan Kepuasan Hidup Clara Moningka	319
Bab 21: Dari Identitas Nasional Menjadi Identitas Diri Rifqi Muhammad	331
Bab 22: Menumbuhkan Nasionalisme melalui Identitas Moral dan Tujuan Hidup pada Generasi Muda Livia Yulawati	345
Bab 23: Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kampus Rini Nurahaju	355

Bagian 5 - Generasi Milenial dan Integrasi Bangsa

Bab 24: Integrasi Bangsa lewat Pendidikan Literasi Digital pada Generasi Muda Ermida Simanjuntak & Ilham Nur Alfian	367
Bab 25: Integrasi Bangsa: Tantangan bagi Generasi Milenial Ike Herdiana	381
Bab 26: Dalam Naungan Tuhan, Bersama Merajut Jalinan Persatuan: Membaca Tafsir Remaja Milenial akan Pancasila Nicolas Indra Nurpatria, Christiany Suwartono, Laurensia Harini Tunjungsari, & Penny Handayani	393
Bab 27: Mistifikasi Generasi Y Agus Suwignyo	409

"Meng-iklan-kan" Integrasi Bangsa

Meike Kurniawati

Pasca Orde Baru: Antara Harapan dan Masalah Baru

Bergantinya era Orde Baru menjadi era Reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Dengan bergantinya era Orde Baru menjadi Era Reformasi sejumlah harapan baru muncul.

Bagi warga Indonesia etnis Tionghoa. Bergantinya era membawa angin segar bagi perkembangan kebudayaan mereka. Seperti diketahui bersama, perkembangan budaya etnis Tionghoa sempat terhambat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 14/1967 mengenai "Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina" yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Inpres tersebut melarang etnis Tionghoa merayakan pesta keagamaan dan adat-istiadat di ruang publik. Pesta keagamaan dan adat istiadat hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Inpres tersebut dijalankan dan diberlakukan sampai kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan Inpres tersebut tidak berlaku lagi sejak mulai diterbitkannya Keppres nomor 6 tahun 2000 mengenai "Pencabutan Inpres no 14 tahun 1967 mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina" yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2000. Pencabutan Inpres tersebut membawa perubahan besar dalam perkembangan budaya etnis Tionghoa. Saat ini, etnis Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya dengan bebas.

Bagi pers nasional. Pada masa Orde Baru, fungsi pers bisa dikatakan hanya sebagai alat me-langgeng-kan kekuasaan dan kepentingan penguasa, corong komunikasi dari pemerintah ke rakyat. Keberadaan pers diawasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah di bawah Departemen Penerangan dengan tujuan untuk mengantisipasi agar hal-hal buruk di dalam pemerintahan tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak mengherankan apabila pemberitaan yang muncul adalah berita-berita yang menjunjung tinggi keberhasilan pemerintah. Apabila suatu media nekat menerbitkan pemberitaan-pemberitaan miring soal pemerintah, bisa dipastikan akan "dibredel".

Pers masa reformasi menjadi lembaga yang independen. Pers menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan tuntutan maupun dukungan pada pemerintah. Pers juga menjadi sarana pemerintah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, sekaligus menjadi wadah pemerintah untuk mengetahui apakah

kebijakan-kebijakan tersebut disetujui rakyat atau tidak. Pers juga berfungsi sebagai pengawal dan pengontrol kebijakan pemerintah. Harapan baru dalam dunia pemberitaan muncul seiring lahirnya reformasi.

Namun di sisi lain, era reformasi yang selalu dihubungkan dengan kebebasan, membuat kebebasan pers sama dengan kebebasan sebeb-as-besanya. Pers masa reformasi bebas menuliskan apa pun kritik mereka terhadap pemerintah. Tidak ada pembungkaman, apalagi pembredelan. Kebebasan tanpa batas tentunya menimbulkan masalah baru. Kebebasan pers tanpa batas membuat pers terkadang terkesan terlewat batas. Norma kesopanan, kesucilaan, privasi, dan keseimbangan pemberitaan seringkali diabaikan demi *rating* acara.

Kebebasan Mengemukakan Pendapat dan Berbicara. Reformasi identik dengan demokrasi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pada masa Orde Baru apabila seseorang atau sekelompok orang berani berbicara mengenai kejelekan atau mengkritik penguasa, konsekuensinya adalah mendapat hukuman penjara atau bahkan "dihilangkan". Maka tidak mengherankan hanya segelintir orang yang berani melakukannya. Ketika reformasi, kebebasan diartikan sebagai kebebasan yang sebeb-as-besanya. Pada masa reformasi hingga saat ini, masyarakat seolah-olah bebas berkomentar atau berbicara apa saja, tentang siapa saja tidak terkecuali penguasa. Kebebasan ini makin menjadi-jadi karena adanya ruang di media televisi, radio, dan juga media sosial yang dengan mudah diakses oleh siapa saja, dan digunakan sebagai wadah berkomentar dan "berbicara" secara bebas. Semua orang seolah bebas berbicara tanpa berpikir benar atau salah, pantas atau tidak, sopan atau tidak. Ujaran kebencian, *body shaming*, *bullying*, dengan mudah dapat kita temukan. Kejadian ini bisa menimpa siapa saja tidak terkecuali pimpinan/penguasa. Tentunya ini adalah masalah besar yang harus ditanggulangi dengan segera. Jangan sampai bangsa Indonesia yang dikenal santun dalam perkataan dan perbuatan menjadi bangsa yang agresif, beringas, menyerang, dan tidak santun dalam menyampaikan pendapat.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Tidak lama setelah jatuhnya Soeharto, organisasi-organisasi yang dulunya "tidak muncul di permukaan" kini unjuk gigi. Sejak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Sejak saat itu semua bentuk organisasi hanya boleh menggunakan azas Pancasila. Menolak Pancasila sebagai azas tunggal berarti merupakan pengkianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi kehadiran organisasi-organisasi ini menambah kaya keberagaman di Indonesia. Namun disisi lain juga mengancam keberagaman. Sejumlah organisasi hadir dengan membawa wajah Islam yang radikal. Organisasi-organisasi dengan wajah Islam radikal tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang menyudutkan

kelompok atau tertentu, bahkan ada yang berupaya mengubah dasar negara. Hal ini tentunya menimbulkan masalah yang sangat mengancam integrasi atau kesatuan bangsa Indonesia.

Pembelajaran Integrasi Bangsa Melalui Pemahaman Nilai-nilai Pancasila

Bagi generasi yang tumbuh besar di era Orde Baru atau generasi 90-an tentunya tidak asing dengan istilah wawasan nusantara, dan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pada masa itu, setiap siswa dari mulai jenjang SD, SMP dan SMA wajib mengikuti penataran. Penataran P4 menjadi bagian kurikulum pendidikan yang wajib diikuti para pelajar sampai mahasiswa. Bahkan pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru lulus pun harus masuk kelas Penataran P4 terlebih dahulu sebelum bertugas. Penataran P4 ini biasanya dilakukan selama satu minggu, di awal mulai masuk sekolah. Selama penataran materi yang diberikan adalah Pancasila, wawasan nusantara. Pemahaman mengenai Pancasila sangat ditekankan tentang bagaimana Indonesia adalah negara dengan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Bagaimana Pancasila dirumuskan dengan sangat luar biasa oleh para pendiri Bangsa.

Dalam kaitannya dengan wasasan nusantara, dalam *wikipedia* dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara mempersatukan seluruh suku, agama dan golongan yang tinggal di berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Wawasan yang mempersatukan kesamaan pandang terhadap Nusantara Indonesia dan kesamaan dalam hidup bernegara.

Dalam Tap MPR no. I/MPR/2003 disebutkan bahwa sila Pancasila dijabarkan menjadi 45 butir sebagai berikut:

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga (Persatuan Indonesia)

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan)

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Penulis sengaja mengutip Tap MPR no. I/MPR/2003 berisi penjabaran sila-sila Pancasila (dari sila pertama sampai sila kelima) secara detil dengan tujuan untuk mengingatkan, bahkan mengenalkan kepada para pembaca tulisan ini mengenai nilai-nilai luar biasa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Beberapa pandangan negatif berpendapat bahwa tujuan kegiatan penataran P4 adalah sebagai alat penguasa untuk mendoktrin generasi muda Indonesia agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Namun di sisi lain, dengan adanya pembelajaran ini generasi muda menjadi paham bahwa Indonesia adalah nusantara yang begitu besar, kaya akan sumber daya alam dan manusia. Negara dengan begitu banyak suku, bangsa, dan budaya yang harus sama-sama dijaga keutuhannya. Generasi muda menjadi paham bahwa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun pada kenyataannya masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan sebagainya.

Setelah Orde Baru berganti menjadi Orde Reformasi, semua hal yang berbau Orde Baru dihilangkan. Semua warisan Orde Baru dianggap tidak baik, tidak perlu, dan bahkan mungkin bisa memunculkan "trauma" tertentu. Padahal tidak semua warisan Orde Baru adalah buruk. Di era reformasi, kegiatan penataran P4, pemahaman wawasan nusantara dan sebagainya dihilangkan. Anak-anak sekolah sudah tidak lagi belajar dan mungkin tidak lagi mengenal Pancasila sebaik dulu. Bahkan jamak ditemukan kasus anak-anak maupun orang dewasa yang sudah tidak lagi hapal Pancasila, termasuk kasus seorang artis yang tidak hapal Pancasila namun secara ironis justru dijadikan duta Pancasila.

Fungsi dan kedudukan Pancasila mulai terancam di era reformasi (Kristiono, 2017). Kepercayaan terhadap Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan dalam dunia pendidikan. Pancasila seolah hanya menjadi penghias buku sejarah. Burung Garuda hanya sebatas lambang yang harus ada di setiap ruang kelas, ruang pertemuan berdampingan dengan foto Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pancasila dan Burung Garuda sarat akan makna. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental (Adi, 2016). Bagaimana generasi muda akan paham dan mengamalkan Pancasila bila mengenalnya pun tidak. Untuk bisa memahami, mengamalkan sesuatu dengan baik, tentunya kita harus terlebih dahulu mengenalnya. "Kalau tidak kenal mustahil bisa sayang". Pancasila harus dikenalkan pada generasi muda. Pancasila harus "diiklankan" bukan "ditenggelamkan", "dikalahkan" oleh iklan partai politik.

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan jelas menggambarkan integrasi bangsa. Bagaimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila-sila dalam Pancasila dengan jelas mengatur bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan agama, hubungan dengan sesama, persatuan Indonesia, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan bagaimana perilaku mengutamakan kesejahteraan bersama. Singkatnya, setiap isi Pancasila menggambarkan dengan jelas bagaimana kehidupan bernegara dan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila maka cita-cita luhur bangsa akan tercapai, bangsa kita akan terintegrasi menjadi satu kesatuan yang kuat.

Meng-iklan-kan Integrasi Bangsa

Untuk bisa mengiklankan integrasi bangsa hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah mengiklankan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, melalui upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- Kurikulum Pancasila hendaknya ditanamkan dalam diri generasi muda sejak di pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Bentuk program bisa dalam bentuk mata pelajaran atau dimasukkan dalam kegiatan orientasi siswa.
- Melakukan program Reorientasi Pancasila untuk masyarakat umum.
- Melakukan kegiatan-kegiatan kekinian dengan tema Pancasila, misal: Pancasila Run, kegiatan Pancasila di *mall*, dan sebagainya.
- Membuat *merchandise* Pancasila yang keren dan membanggakan sehingga generasi muda familiar dengan Pancasila. Masih teringat dengan jelas bagaimana ketika timnas sepakbola Indonesia berhasil mencapai final dan menjadi juara, bagaimana orang sampai antri untuk membeli demi bisa mengenakan pakaian timnas. Lambang Garuda di dadaku menjadi sangat membanggakan. Timnas sepakbola menjadi terkenal, tertanam dalam benak, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

Lantas bagaimana mengiklankan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan integrasi bangsa? Berikut adalah langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan:

- Elite politik, tokoh ternama harus memberikan contoh perilaku. Sayangnya, selama ini banyak elite politik, tokoh ternama justru mengobarkan semangat perpecahan. Mereka justru menjadi provokator.
- Pemberian hukuman yang tegas bagi para oknum pelaku yang menyebarkan fitnah, *boax*, atau apa pun yang dapat mengancam integrasi bangsa

- Stop mengangkat tokoh-tokoh provokator perpecahan bangsa di ruang publik, ruang media massa
- Gunting sensor pemerintah harus tajam terutama untuk kegiatan atau acara yang dianggap mempromosikan perpecahan atau mengancam persatuan

Peran Psikologi dalam "Mengiklan-kan" Integrasi Bangsa

Tugas mengiklan-kan integrasi bangsa harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk para ilmuwan/praktisi psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku harus turut berperan serta membantu pemerintah untuk mengiklan-kan integrasi bangsa. Apa yang bisa disumbangkan oleh psikologi dalam mengiklan-kan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda? Ilmuwan/praktisi psikologi khususnya Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sosial perlu:

- Bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun program pendidikan Pancasila yang tidak terkesan bersifat indoktrinasi. Program pendidikan Pancasila yang menyenangkan, tidak membosankan namun tetap sarat dengan penanaman nilai.
- Menyusun program pendidikan Pancasila yang sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik per jenjang pendidikan. Psikolog pendidikan berperan menyusun program pendidikan Pancasila yang sesuai tahapan perkembangan, tugas perkembangan, sehingga program yang ditawarkan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan peserta didik.
- Bersama pihak terkait mengembangkan program di media massa tentang Pancasila dalam format yang menghibur, menyenangkan bukan yang bersifat monoton. Peran media massa dalam menciptakan budaya di masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi. Kemajuan media komunikasi saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik terhadap pemikiran maupun pola hidup (Fitriyansah, 2018). Psikolog berperan aktif terutama dalam mengontrol isi dari materi yang beredar di media massa. Psikolog memiliki kemampuan dalam menilai bagaimana respon dan penerimaan masyarakat terhadap suatu keadaan. Sehingga diharapkan program yang dikembangkan dapat diterima dengan baik di masyarakat.
- Menyusun program reorientasi Pancasila untuk khalayak umum, melalui seminar-seminar nilai Pancasila dengan tema dan judul kekinian sehingga menarik minat khalayak.
- Membantu pemerintah mengedukasi masyarakat (melalui poster, aksi-aksi

di media sosial, dan sebagainya) sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan tidak mudah termakan *hoaks* dan isu-isu yang membahayakan persatuan kesatuan bangsa.

- Berperan aktif mengontrol media, pemerintah, lembaga negara, organisasi, dan sebagainya ketika pihak tersebut "mentolerir" atau "meloloskan" atau "membiarkan" atau "mempromosikan" kelompok acuan atau kegiatan yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa. Di dalam psikologi dikenal istilah kelompok acuan, yaitu kelompok yang berperan sebagai titik acuan bagi individu dalam pembentukan kepercayaan, sikap dan perilaku mereka (Assael, 2001); atau kekelompok orang yang dianggap memiliki aspirasi, opini, preferensi, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang digunakan oleh orang lain sebagai dasar dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiman, 2013); yang pandangan, sikap, dan perilakunya digunakan sebagai dasar pembentukan pandangan, sikap, dan perilaku orang lain (Arnould, Price, Linda & George (2002). Kelompok acuan berperan sangat besar dalam menginspirasi, merubah perilaku dan pemikiran seseorang. Pemilihan kelompok acuan dengan pandangan yang positif tentang Pancasila diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat untuk setia pada Pancasila. Sebaliknya, ketika terjadi kesalahan dalam memilih kelompok acuan (misal kasus artis tidak tahu Pancasila, malah menjadi duta Pancasila) tentu saja efek negatif yang akan didapat.

Dengan sinergi dan usaha semua komponen bangsa, upaya untuk mengiklankan dan menjaga persatuan kesatuan bangsa bukanlah hal yang mustahil. Seluruh komponen bangsa termasuk para ilmuwan psikologi harus segera bergerak sebelum integrasi bangsa Indonesia berubah menjadi disintegrasi. Para ilmuwan dan praktisi Psikologi, HIMPSI, mampu berperan besar dalam upaya untuk tetap menyatukan bangsa Indonesia. HIMPSI sebagai satu-satunya asosiasi profesi Psikologi harus berperan aktif sejajar dengan organisasi profesi lainnya dalam membantu pemerintah mengupayakan tetap kokohnya persatuan Indonesia, sesuai dengan porsi dan fungsi profesinya. Pola pikir, pandangan, dan pemahaman masyarakat akan Pancasila dan integrasi bangsa perlu diubah ke arah yang positif. Ketika pola pikir berubah maka perilaku akan mengikuti. Tugas Psikologi adalah membantu pemerintah mengubah pola pikir masyarakat dan pada akhirnya mengubah perilaku ke arah tercipta dan terjaminnya integrasi bangsa.

Daftar Acuan

- Adi, P. (2016). Pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 37-50.
- Arnould, J.E., Price, Linda. L., & Zinkhan, G. M. (2002), *Consumers* (International Edition). New York: McGraw-Hill.
- Assael, H. (2001). *Consumer behaviour and marketing action*. New York: Thompson.
- Belch & Belch. (2009). *Advertising & promotion*. New York: Mc. Graw-Hill.
- Budiman, A. (2014, 30 Juli). Kelompok acuan dalam *political marketing*. *Banjarmasin Pos*.
- Fitriansyah, F. (2018). Efek komunikasi massa pada khalayak (Studi deskriptif penggunaan media sosial dalam membentuk perilaku remaja). *Cakrawala*, 18(2), 171-178.
- Kristiono, N. (2017). Penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Harmony*, 2(2), 193-204.